

BAB II

KONFLIK BERSENJATA ANTARA UKRAINA DAN RUSIA

Bab ini membahas mengenai hal yang mendorong terjadinya konflik antara Ukraina dan Rusia yang kemudian semakin memuncak dan menjadi perhatian dari komunitas internasional. Bab ini juga membahas bagaimana konflik bersenjata yang terjadi antara Ukraina dan Rusia tidak hanya membahayakan masyarakat setempat saja, tetapi juga membahayakan masyarakat asing yang berada di wilayah konflik termasuk warga negara Indonesia yang berada di Ukraina.

2.1. Hubungan antara Ukraina dan Rusia Pasca Runtuhnya Uni Soviet

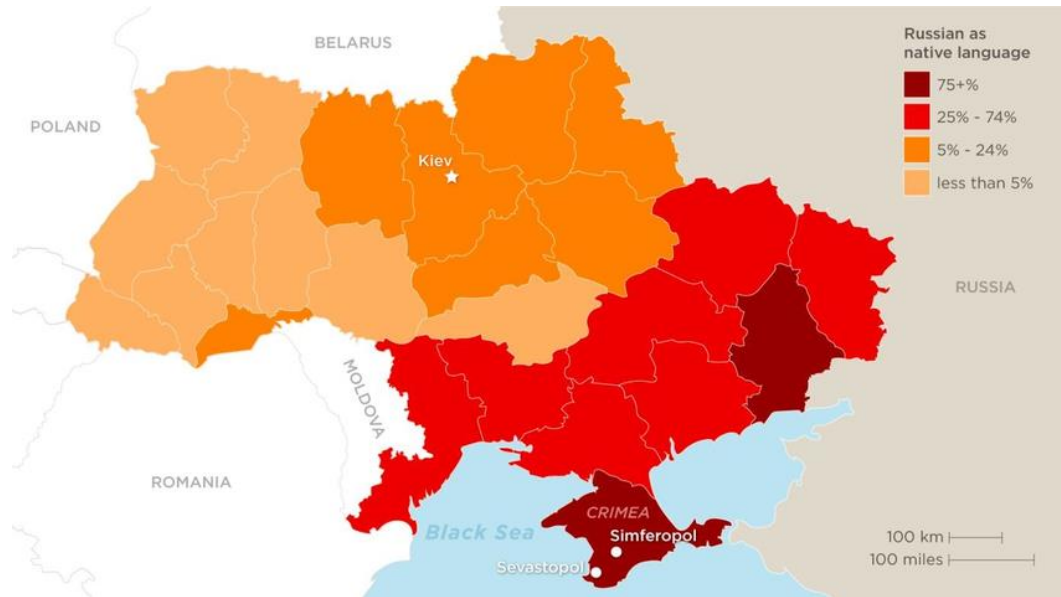
Runtuhnya Uni Soviet menjadi awal mula bagi Ukraina untuk menjadi negara yang independen tanpa berada di bawah naungan Uni Soviet. Ketika Mikhail Gorbachev memaparkan kebijakan-kebijakan reformasinya untuk Uni Soviet, gerakan nasionalis yang bertujuan untuk membuat Ukraina memisahkan diri dari Uni Soviet semakin bermunculan. Dengan bubarnya Uni Soviet dan Ukraina yang kembali menjadi negara independen, Leonid Makarovych Kravchuk ditunjuk secara resmi sebagai presiden pertama bagi negara Ukraina yang berdiri secara independen pada tahun 1991 (Simon, 2002).

Kondisi Ukraina setelah bubarnya Uni Soviet dan menjadi negara yang independen tentunya menjadi momentum yang sangat ditunggu-tunggu bagi masyarakatnya. Namun di sisi lain, peristiwa ini menjadi hal

yang disayangkan oleh Rusia. Lepasnya Ukraina dari Uni Soviet tentu membuat Rusia merasa kehilangan pengaruhnya atas negara tersebut. Terlebih lagi karena Ukraina dengan potensi pertanian yang cukup tinggi membuat Rusia merasa kehilangan aset-aset ekonominya selama tergabung dalam Uni Soviet.

Ukraina juga merupakan negara yang memiliki sejarah etnik yang turut berhubungan dengan Rusia. Beberapa wilayah kedaulatan Ukraina sendiri memiliki populasi masyarakat etnis Rusia yang cukup signifikan, terutama wilayah timur dan selatan Ukraina. Keberadaan etnis Rusia di wilayah kedaulatan Ukraina ini cenderung menjadikannya faktor pendorong bagi Rusia untuk masih memberikan pengaruhnya terhadap beberapa wilayah di Ukraina dengan alasan untuk kepentingan dan pemenuhan hak-hak terhadap etnis Rusia yang berada di wilayah timur dan selatan Ukraina. Populasi etnis Rusia yang cukup signifikan di Ukraina berada di wilayah Krimea, Donbas (Donetsk dan Luhansk), Zaporizhzhia, Kharkiv, Odessa, Dnipro dan beberapa wilayah lainnya yang tersebar seperti yang diilustrasikan pada Gambar 2.1.

Gambar 2.1. Peta Persebaran Populasi Pengguna Bahasa Rusia Sebagai Bahasa Ibu di Ukraina Berdasarkan Sensus Pada Tahun 2001



Sumber: *A Divided Ukraine*, CNN, 2014.

Persebaran etnis Rusia di Ukraina di tandai dengan tren pengguna bahasa Rusia sebagai bahasa ibu yang dimiliki oleh masyarakat di beberapa wilayah di Ukraina. Seperti yang ditunjukkan pada Gambar 2.1, persebaran populasi masyarakat Ukraina yang menggunakan bahasa Rusia sebagai bahasa ibu sebagian besar tersebar pada wilayah selatan dan timur Ukraina karena pada wilayah-wilayah tersebut Ukraina berbatasan langsung dengan Rusia dan cenderung berbagi warisan budaya serta sejarah dengan negara adidaya tersebut (CNN, 2014). Tentunya dengan tingginya populasi etnis Rusia di beberapa wilayah ini membuatnya memiliki kemungkinan tinggi untuk diklaim kembali oleh Rusia.

Kemudian apabila dilihat secara geografisnya, wilayah Ukraina berada di antara wilayah teritorial Rusia dan wilayah teritorial negara-

negara Eropa Barat. Dengan adanya status independen dari Ukraina membuat pergerakan pengaruh Rusia menuju negara-negara di Eropa Barat menjadi terbatas. Rusia juga memiliki kekhawatiran akan pengaruhnya terhadap Ukraina menjadi semakin pudar dan Ukraina akan lebih berkecenderungan kepada pengaruh Eropa Barat.

Pada *Bucharest Summit* di tahun 2008, Ukraina dan Georgia memiliki keinginan untuk bergabung dengan NATO dan negara-negara NATO menyambut baik aspirasi Ukraina untuk menjadi salah satu negara anggotanya (NATO, 2008). Sebagai tanggapan dari hal tersebut, Rusia mengatakan bagaimana negara tersebut tidak setuju apabila Ukraina dan Georgia menjadi negara anggota dari NATO dan menjadi bagian dari sekutu pihak barat. Pihak Rusia mengatakan bahwa apabila Ukraina maupun Georgia menjadi bagian dari NATO, Rusia tidak akan segan untuk melakukan aksi militer sebagai bentuk ketidaksukaan mereka (Agenda.ge, 2021).

Ketegangan antara Ukraina dan Rusia berlanjut hingga pada bulan Februari 2014 ketika Rusia mulai menginvasi wilayah timur Ukraina, yakni Krimea (European Parliamentary Research Service, 2016). Hal ini yang kemudian memicu kembali ketegangan pada hubungan antara Ukraina dan Rusia. Invasi dan klaim secara sepihak yang dilakukan oleh Rusia terhadap Krimea sangat dikecam, baik oleh Ukraina maupun negara-negara lainnya yang menunjukkan sikap pro terhadap Ukraina.

Hal yang dilakukan oleh Rusia ini sangat dikecam oleh dunia internasional dinilai telah melanggar sejumlah kesepakatan yang sebelumnya telah ditandatangani oleh pihak Ukraina dan juga Rusia. Namun Rusia tetap menganeksasi wilayah Krimea setelah penduduk Krimea yang berlatar belakang Rusia memilih untuk bergabung dengan Rusia (Cosgrove, 2020).

Hingga saat ini, wilayah Krimea didominasi dan diatur oleh pihak Rusia. Namun secara *de jure*, Krimea tetap merupakan bagian dari Ukraina. Dunia internasional juga tetap masih mengakui Krimea sebagai wilayah teritorial milik Ukraina. Wilayah selatan Ukraina yang telah dianeksasi dan diambil alih oleh Rusia secara sepihak ini dapat dilihat pada Gambar 2.2.

Gambar 2.2. Peta Wilayah Ukraina (Krimea) Yang Dianeksasi Oleh Rusia Pada Tahun 2014



Sumber: *Supporting Ukraine between crisis and transformation – Ukraine Week in the European Parliament*, European Parliamentary Research Service, 2016.

2.2. Invasi Rusia dan Urgensi Keamanan di Ukraina

Invasi Rusia terhadap Ukraina yang bermula pada tahun 2014 di wilayah Krimea yang merupakan wilayah Ukraina dengan populasi etnis Rusia terbanyak karena statusnya yang sebelum tahun 1954 juga merupakan wilayah teritorial milik Rusia. Fakta ini tentunya membuat Rusia lebih mudah dalam melakukan invasi terhadap Ukraina karena keberadaan masyarakat yang pro Ukraina tidak begitu banyak.

Pendorong lainnya yang membuat Krimea menjadi sasaran bagi invasi Rusia adalah wilayahnya yang berada di posisi strategis Laut Hitam dan terdapat pula markas besar militer milik Rusia di wilayah tersebut. Dengan diambil alihnya Krimea membuka jalan bagi Rusia untuk semakin memberikan pengaruhnya terhadap Ukraina (Cecire, 2014).

Selain terjadinya aneksasi terhadap Krimea oleh Rusia, pada 2014 terjadi konflik pada beberapa wilayah Ukraina terutama pada wilayah timur. Konflik ini terjadi karena adanya gerakan separatis yang berpihak pada Rusia dan mengklaim wilayahnya lepas dari Ukraina dan hal ini tentunya didukung oleh Rusia. Dugaan dukungan Rusia atas gerakan separatis ini terbukti oleh keberadaan senjata-senjata serta pasukan Rusia di wilayah timur Ukraina, terutama Donetsk dan Luhansk.

Keberlangsungan konflik akan gerakan separatis ini terjadi dengan semakin berbahaya dan menyebabkan ribuan korban berjatuhan. Hal ini pun membuat pemerintah Ukraina terpaksa untuk ikut turun tangan dan menerjunkan operasi militer di wilayah-wilayahnya yang terjadi konflik.

Hingga awal 2015, wilayah konflik oleh gerakan separatis pun meluas sepanjang wilayah timur perbatasan Ukraina dengan Rusia, meliputi wilayah bandar udara Donetsk (ABC News, 2016). Gambaran mengenai wilayah konflik di Ukraina hingga tahun 2015 dapat dilihat pada Gambar 2.3.

Gambar 2.3. Peta Wilayah Konflik oleh Gerakan Separatis Pro-Rusia di Ukraina Pada Tahun 2015



Sumber: *Explained: Ukraine conflict in maps*, ABC News., 2014.

Pada tahun 2021, Rusia secara terbuka mengirim pasukan militer yang cukup besar di sepanjang wilayah perbatasan Rusia-Ukraina. Rusia juga mengirim pasukan militer ke Belarus untuk memberikan dukungan bagi gerakan separatis di sana dan mengirimkan sejumlah pasukan lagi ke wilayah Moldova dan Krimea. Hingga pada Februari 2022, terdapat setidaknya 190,000 anggota pasukan militer berposisi di sekitar perbatasan

Ukraina (Wintour, 2022). Ketegangan antara Ukraina dan Rusia menjadi semakin meningkat ketika pada tanggal 24 Februari 2022, Rusia memulai invasinya ke wilayah Ukraina sesuai dengan perintah dari presidennya, Vladimir Putin. Pemimpin Rusia tersebut mengklaim bahwa gerakan pasukan militer yang memasuki Ukraina berperan sebagai aktor perdamaian, namun klaim tersebut tidak sejalan dengan apa yang terjadi di hari tersebut. Suara ledakan terdengar di kota-kota besar di Ukraina dan sirene serengana udara terdengar di ibu kota Ukraina, Kyiv.

Melalui serangan ini, diketahui bahwa pihak Rusia berusaha untuk mengambil alih Kyiv dan membuatnya menjadi pusat pemerintahan yang berkiblat pada Moskow. Upaya Rusia bisa dikatakan tidak mudah karena adanya pertahanan yang kuat dari Ukraina. Namun dengan adanya serangan Rusia membuat urgensi keamanan di Ukraina menjadi semakin meningkat, terutama dengan berjatuhnya banyak korban, termasuk warga sipil yang berada di Ukraina. Jumlah korban akibat dari serangan Rusia terhadap Ukraina dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1. Jumlah Korban Serangan Rusia per 7 Maret 2022

Jenis Korban	Dewasa			Anak-Anak		
	Laki-Laki	Perempuan	Tidak diketahui	Laki-Laki	Perempuan	Tidak diketahui
Terluka	72	51	636	2	11	29
Meninggal dunia	77	45	257	8	4	15

Sumber: *Office Of The High Commissioner For Human Rights, 2022.*

Jumlah korban yang dipaparkan pada Tabel 2.1 menyentuh angka 1,207 orang warga sipil. Data tersebut dicatat berdasarkan korban-korban yang tersebar di beberapa wilayah Ukraina pada saat konflik antara Rusia dan Ukraina terjadi. Korban, baik korban terluka maupun meninggal dunia, tersebar pada wilayah Donetsk dan Luhansk sebanyak 528 orang, pada wilayah di bawah kendali pemerintah Ukraina sebanyak 394 orang, pada wilayah yang diklaim secara sepihak sebagai ‘wilayah republik’ sebanyak 134 orang dan pada kota-kota lainnya di Ukraina sebanyak 679 orang (OHCHR, 2022b).

Warga sipil yang menjadi korban dari serangan Rusia yang dimulai pada 24 Februari 2022 ini tidak hanya terdiri dari warga negara Ukraina saja, tetapi juga warga negara asing yang sedang berada di Ukraina. Walaupun tidak ada data resmi yang memaparkan jumlah warga negara asing yang menjadi korban dari serangan Rusia ini, tetapi sejumlah media telah memberitakan adanya sejumlah korban jiwa yang merupakan warga negara asing.

Pada 28 Februari 2022, Kementerian Luar Negeri Algeria mengumumkan bahwa salah satu warga negaranya yang merupakan mahasiswa di Ukraina menjadi korban jiwa atas serangan yang diluncurkan oleh Rusia di Kharkiv (Middle East Eye, 2022). Kemudian pada 3 Maret 2022 juga telah diberitakan bahwa terdapat empat warga negara Tiongkok dan satu warga negara India yang menjadi bagian dari 13 mahasiswa di *Kharkiv State Academy of Culture* yang meninggal dunia akibat serangan

Rusia terhadap Ukraina (Taiwan News, 2022). Adanya korban yang berstatus sebagai pelajar asing ini terjadi karena Ukraina memiliki cukup banyak pelajar asing yang menempuh studi di Ukraina, terutama di Kharkiv. Hingga tahun 2022, terdapat sekitar 76,548 pelajar asing yang tersebar di 155 universitas di Ukraina dan sebagian besar didominasi oleh pelajar asing yang berasal dari India (Kasturi, 2022).

Korban yang telah di data oleh *Office Of The High Commissioner For Human Rights* (OHCHR) maupun yang diberitakan oleh media ini diakibatkan oleh serangan senjata peledak seperti artileri, sistem roket artileri, misil dan serangan-serangan udara (OHCHR, 2022b). Dengan banyaknya korban berjatuhan hanya dalam kurun waktu dua minggu setelah serangan pertama dari invasi Rusia di Ukraina pada 24 Februari 2022 membuat peristiwa ini menjadi perhatian dunia, terutama karena hal ini dianggap sebagai suatu pelanggaran hukum internasional oleh Rusia terhadap perdamaian internasional.

Selain banyaknya warga sipil yang menjadi korban dan mencari suaka, konflik antara Ukraina dan Rusia ini juga mengorbankan hidup banyak sekali anggota militer, baik dari Ukraina, Rusia, maupun anggota militer yang diperbantukan dari negara asing. Hingga Februari 2023, terdapat setidaknya 180,000 anggota militer Rusia dan 100,000 anggota militer Ukraina yang gugur di medan perang (The Hindu Bureau, 2023). Media memberitakan bahwa terdapat setidaknya 20,000 anggota militer yang diperbantukan dari luar Ukraina untuk melawan pasukan Rusia dan

terdapat sekitar 100 anggota militer asing yang gugur, di mana di antaranya termasuk anggota militer dari Amerika Serikat, Inggris dan Kanada (Makuch, 2023).

Michelle Bachelet, selaku komisioner ketujuh OHCHR dan juga mantan presiden Chile, memberikan pemaparan mengenai invasi Rusia di Ukraina pada *Briefing to the United Nations Security Council (UNSC)* yang dilaksanakan pada 5 Mei 2022 di New York. Pada acara *briefing* ini disebutkan bahwa adanya serangan bersenjata dari Rusia turut membuat warga sipil mencari suaka dan berbondong-bondong pergi meninggalkan wilayah konflik menuju wilayah lainnya yang dianggap lebih aman.

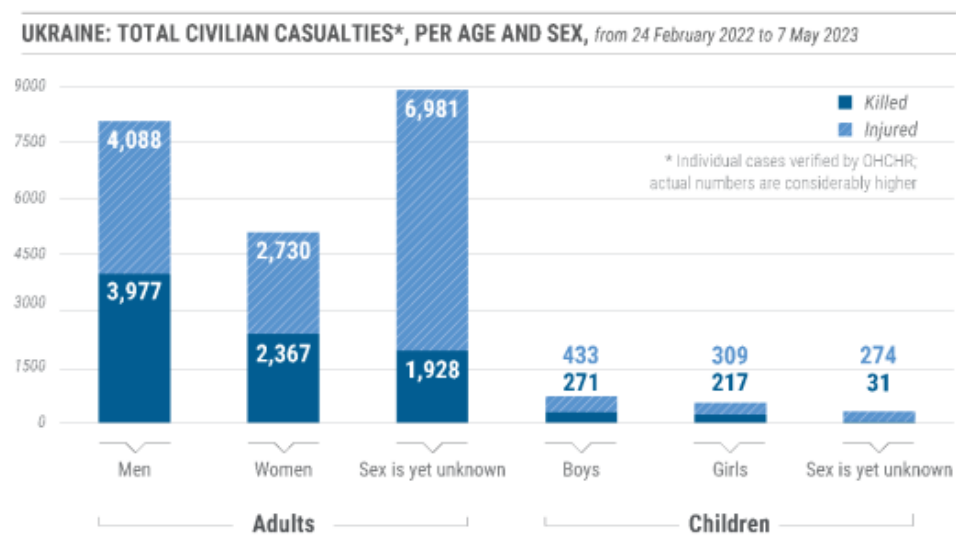
Dikatakan pula bahwa berdasarkan observasi staf OHCHR yang ditugaskan di Ukraina, Rusia telah melakukan berbagai pelanggaran dalam konteks hukum HAM internasional serta hukum humaniter internasional. Serangan-serangan yang dilakukan oleh Rusia pun sudah dianggap awal mula dari kejahatan perang (OHCHR, 2022a).

Selain adanya serangan-serangan melalui senjata peledak, pasukan militer Rusia juga dilaporkan menahan, menganiaya, bahkan memindahkan laki-laki yang dianggap mencurigakan ke wilayah lain. Banyak sekali laporan warga sipil yang mengatakan bahwa mereka menyaksikan kerabatnya dipukuli oleh pasukan militer Rusia dan laporan akan orang hilang pun terus bertambah (OHCHR, 2022a).

Seperti yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, konflik yang terjadi ini meningkatkan angka perpindahan warga sipil yang semula

bertempat tinggal di Ukraina, terutama pada wilayah-wilayah konflik, untuk pergi mencari suaka hingga keluar dan melewati perbatasan Ukraina. Dengan demikian tentunya dibutuhkan upaya dalam memastikan keselamatan dan melindungi warga sipil yang berada di Ukraina. Hingga saat ini, konflik masih terus berlanjut dan angka korban yang diakibatkan oleh serangan Rusia ini terus bertambah (OHCHR, 2023). Hal ini dapat dilihat pada Gambar 2.4.

Gambar 2.4. Total Korban Konflik Bersenjata di Ukraina per 7 Mei 2023



Sumber: *Office Of The High Commissioner For Human Rights, 2023.*

2.3. Respon Indonesia Terhadap Konflik antara Ukraina dan Rusia

Dalam menyikapi konflik yang terjadi antara Ukraina dan Rusia, Presiden Joko Widodo memberikan pernyataan melalui media sosialnya yang meminta agar perang yang terjadi untuk segera dihentikan (Widodo, 2022). Kemudian pada 25 Februari 2022, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia merilis pernyataan resmi dan meminta agar konflik

yang terjadi antara Ukraina dan Rusia untuk segera dihentikan. Pihak Kementerian Luar Negeri juga mendukung PBB untuk segera mengambil tindakan dalam menyikapi konflik yang terjadi. Pemerintah Indonesia juga secara aktif terus melakukan pembaharuan terhadap rencana evakuasi terhadap WNI yang berada di Ukraina (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2022a).

2.4. Perlindungan terhadap Warga Sipil Pada Saat Perang

Serangan Rusia berdampak pada jatuhnya korban luka-luka maupun meninggal dunia di sejumlah wilayah konflik di Ukraina. Kekhawatiran akan korban yang berjatuhan ini tentunya memerlukan tindakan yang jelas dalam bentuk perlindungan terhadap warga sipil yang berada di wilayah konflik ini. Perlindungan terhadap warga sipil sudah seharusnya dilakukan sebagai bentuk pemenuhan dari HAM yang dimiliki setiap manusia.

Orang-orang yang dilindungi adalah orang-orang yang tengah berada di suatu kondisi konflik yang didominasi oleh kuasa yang bukan berasal dari negara mereka (Geneva Convention Relative To the Protection of Civilian Persons, 1949). Dalam kondisi konflik, orang-orang yang dilindungi ini berhak atas perlindungan dari ancaman-ancaman yang ada guna meringankan potensi penderitaan yang terjadi akibat perang dan hal ini sesuai dengan apa yang telah disebutkan dalam Konvensi Jenewa IV Tahun 1949 mengenai Perlindungan terhadap Warga Sipil Pada Saat Perang yang berbunyi:

“Protected persons are entitled, in all circumstances, to respect for their persons, their honour, their family rights, their religious convictions and practices, and their manners and customs. They shall at all times be humanely treated, and shall be protected especially against all acts of violence or threats thereof and against insults and public curiosity”, (Geneva Convention Relative To the Protection of Civilian Persons, 1949).

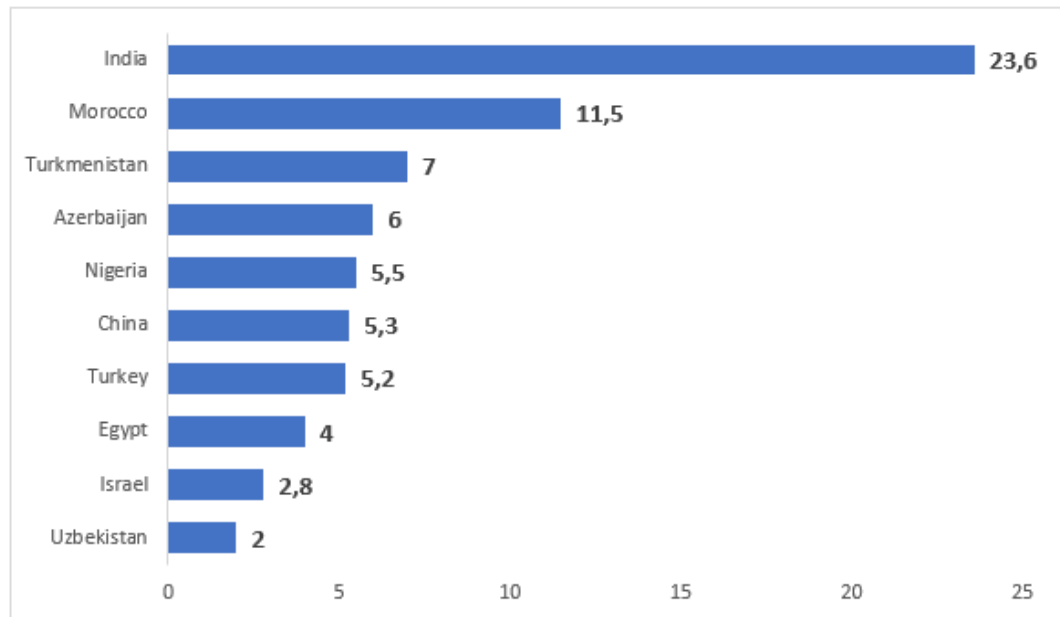
Pada pasal 35 dan 48 yang tercantum di Konvensi Jenewa IV Tahun 1949 mengenai Perlindungan terhadap Warga Sipil Pada Saat Perang pun dikatakan bahwa seluruh orang-orang yang dilindungi, terutama warga negara asing di wilayah konflik, yang memiliki keinginan untuk meninggalkan wilayah konflik, dipersilakan untuk melakukan hal tersebut dengan mengikuti prosedur yang tepat.

Dalam data yang dipublikasikan oleh *State Statistics Service of Ukraina*, populasi penduduk Ukraina per 1 Januari 2022 menyentuh angka 41.17 juta (*State Statistics Service of Ukraine, 2022*). Data tersebut tidak menghimpun angka populasi di wilayah Krimea yang sejak tahun 2014 telah menjadi wilayah yang dianeksasi secara sepihak oleh Rusia. Selain didominasi oleh penduduk yang berkewarganegaraan Ukraina, negara tersebut juga memiliki sejumlah penduduk yang berkewarganegaraan asing maupun penduduk yang tidak memiliki kewarganegaraan resmi atau *stateless*. Hal ini disebabkan oleh tren migrasi yang terjadi, di mana banyak

warga negara asing yang tinggal di Ukraina, baik secara resmi maupun secara terpaksa.

Berdasarkan data yang dimuat oleh IOM Ukraina pada tahun 2021, terdapat setidaknya 293.600 warga negara asing yang menjadi penduduk permanen di Ukraina. Penduduk permanen ini didominasi oleh warga negara asing yang merupakan anggota keluarga dari penduduk yang merupakan warga negara Ukraina dan bagian lainnya terdiri dari warga negara Rusia dan juga negara pecahan Uni Soviet lainnya. Terdapat pula warga negara asing yang menetap secara sementara di Ukraina yang mana sebagian besar adalah pelajar asing maupun pekerja migran yang mana membentuk setidaknya 151.300 orang. Per tahun 2020, pelajar asing yang berada di Ukraina menyentuh angka 76.500 pelajar yang berasal dari setidaknya 155 negara. Persebaran 10 negara asal pelajar asing tertinggi dapat dilihat pada Gambar 2.5. Sedangkan angka pekerja migran tidak dipublikasikan secara keseluruhan, namun disebutkan bahwa pada tahun 2020 terdapat 4.600 pekerja migran yang berasal dari Turki, 1.900 berasal dari India, 1.700 berasal dari Rusia dan 1.200 berasal dari China (IOM Ukraine, 2021).

Gambar 2.5. Negara dengan Pelajar Asing Terbanyak di Ukraina per 2020/2021, dalam Persentase (%)



Sumber: *Migration in Ukraine: Facts and Figures 2021*, IOM Ukraine, 2021.

Selain pelajar asing dan pekerja migran, warga asing yang berada di Ukraina juga terdiri dari kelompok pengungsi. Warga asing yang berstatus sebagai pengungsi dan orang yang terlindungi terdapat setidaknya 2.160 orang per tahun 2020. Para pengungsi ini sebagian besar berasal dari Afganistan, Suriah dan beberapa negara lainnya yang tergabung dalam Persemakmuran Negara-Negara Merdeka (CIS) (IOM Ukraine, 2021).

India yang memiliki warga negara yang berstatus sebagai mahasiswa asing terbanyak di Ukraina turut mengambil sejumlah langkah dalam melindungi warga negaranya di negara tersebut. India turut mengirimkan empat pejabatnya ke perbatasan Ukraina untuk membantu proses evakuasi warga negara India yang telah melewati wilayah perbatasan. Selain itu, terdapat beberapa warga negara asing di Ukraina yang terlantar dan masih

menunggu bantuan dari pemerintah negara asal mereka. Pemerintah Inggris sendiri membuat pernyataan bahwa mereka tidak bisa secara langsung memberikan bantuan kekonsuleran terhadap warga negaranya yang berada di Ukraina dan hanya bisa mengimbau warga negaranya untuk mematuhi arahan pemerintah setempat (Shandilya, 2022).

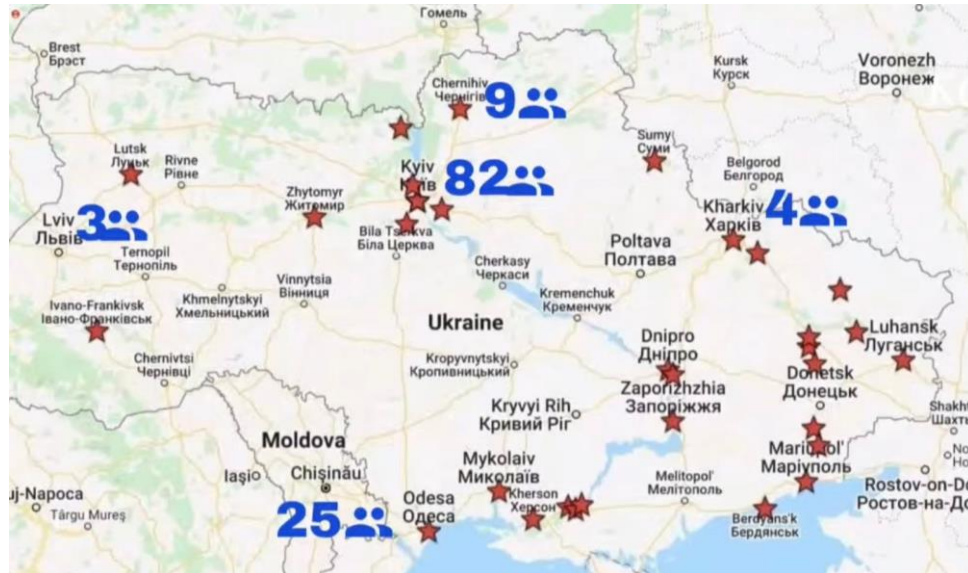
Dalam menyikapi kondisi konflik di Ukraina, pemerintah Mesir, Jerman dan Prancis turut mengimbau warga negaranya untuk segera meninggalkan wilayah Ukraina. Berbeda dengan negara-negara yang telah disebutkan sebelumnya, Pemerintah Cina tidak memberikan imbauan kepada warga negaranya untuk meninggalkan Ukraina ketika negara tersebut belum diserang oleh Rusia. Namun ketika serangan dari Rusia telah terdeteksi, pemerintah Cina kemudian menyiapkan pesawat sewaan untuk mengangkut warga negaranya dari Ukraina. Namun menimbang konflik yang tengah terjadi, Duta Besar Cina membuat pernyataan bahwa proses evakuasi sulit untuk dilakukan (Shandilya, 2022).

2.4.1. Peran Indonesia dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Warga Negara Indonesia di Ukraina

Orang-orang yang dilindungi dalam konteks kondisi konflik bersenjata tidak hanya mencakup warga sipil yang berwarga negara Ukraina saja, tetapi termasuk juga warga negara Indonesia (WNI) yang pada saat konflik sedang berada di Ukraina. Walaupun telah dilaporkan bahwa tidak ada WNI yang menjadi korban dalam invasi Rusia terhadap Ukraina ini, tetapi tidak sedikit WNI yang terjebak

dan tersebar di beberapa wilayah konflik di Ukraina, seperti yang diilustrasikan pada Gambar 2.6.

Gambar 2.6. Persebaran WNI di Ukraina per 26 Februari 2022



Sumber: Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2022.

Dalam *press briefing* yang dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri Indonesia pada 26 Februari 2022, persebaran 153 WNI yang berada di Ukraina terdiri dari 82 WNI di Kyiv, 25 WNI di Odesa, 9 WNI di Chernihiv, 4 WNI di Kharkiv, 3 WNI di Lviv dan 30 WNI lainnya tersebar di wilayah lainnya (KOMPAS TV, 2022). Kemudian pada laporan yang dipaparkan oleh Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia pada Maret 2022, jumlah WNI yang berada di Ukraina telah bertambah menjadi 160 WNI (Kompas.com, 2022).

Seperti yang telah disebutkan dalam Konvensi Jenewa IV, orang-orang yang dilindungi ini dapat meninggalkan wilayah

konflik. Hal ini tentunya dapat terjadi dengan bantuan pihak yang mampu mengakomodir dan memberi dukungan. Untuk melindungi WNI yang berada di wilayah konflik, tentunya pemerintah Indonesia memiliki tanggung jawab penuh. Hal ini juga berlaku pada warga negara Indonesia yang berada di Ukraina pada saat konflik berlangsung.

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia sebagai perwakilan bagi pemerintah pusat yang bertugas dalam mengurus kepentingan-kepentingan Indonesia di dunia internasional menjadi salah satu pihak yang turut andil dan berperan penting dalam melakukan perlindungan terhadap WNI yang berada di Ukraina. Aktor-aktor dalam upaya perlindungan WNI di luar negeri telah ditetapkan dalam Pasal 3 Ayat (1) Permenlu Nomor 5 Tahun 2018 di mana:

“Pelindungan dilakukan oleh: a. Negara, yang dilaksanakan oleh Presiden sebagai Kepala Negara berdasarkan usulan Menteri; b. Pemerintah Pusat, melalui Kementerian Luar Negeri; c. Perwakilan, dalam koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri; dan d. Lembaga/Badan, dalam koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri”, (Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Tentang Perlindungan Warga Negara Indonesia di Luar Negeri, 2018).

Pada kasus konflik bersenjata Ukraina dan Rusia sendiri, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia bersamaan dengan Perwakilan Republik Indonesia yang berada di Kyiv maupun di wilayah sekitar, seperti di Moskow turut andil dalam memaksimalkan perlindungan terhadap WNI yang berada di Ukraina. Adanya pekerja migran Indonesia (PMI) yang termasuk dalam WNI yang berada di Ukraina ketika konflik bersenjata terjadi membuat Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) juga turut ikut serta dalam melakukan perlindungan terhadap WNI di Ukraina (BP2MI, 2022).

2.4.2. Respon Indonesia Menyikapi Kondisi Konflik yang Pernah Terjadi Sebelumnya

Sebelum terjadinya konflik antara Ukraina dan Rusia, Indonesia telah melakukan sejumlah bentuk perlindungan terhadap WNI yang berada di negara yang mengalami konflik. Pada 3 Januari 2020, Amerika Serikat menyerang Bandar Udara Internasional Baghdad (Sebayang, 2020). Serangan Amerika Serikat ini tentunya menimbulkan ketegangan antara negara tersebut dengan Irak dan Iran. Menyikapi kondisi tersebut, KBRI Tehran merilis pernyataan untuk memperingati WNI yang berada di sekitar wilayah konflik untuk sebisa mungkin menghindari wilayah yang berkerumun dan menyiapkan sejumlah barang-barang penting apabila akan dilakukannya evakuasi (CNBC Indonesia, 2020).

Kemudian pada 8 Januari 2020, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia membuat pernyataan resmi dan turut memberikan imbauan kepada WNI di Irak dan Iran. Pihak Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia juga menyampaikan bahwa pihak pusat terus memberpahrui rencana kontijensi jika diperlukanny tindak lanjut dari konflik yang terjadi (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2020). Mengingat kondisi yang masih pada status Siaga 3 dan tidak adanya eskalasi konflik maupun serangan balik, pihak Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia menyampaikan bahwa proses evakuasi tidak dilakukan dan pemerintah Indonesia tetap akan terus memantau kondisi di lapangan (Mufarikha, 2020).

Selain konflik yang terjadi antara Amerika Serikat dengan Irak-Iran, pemerintah Indonesia juga sempat melakukan upaya perlindungan terhadap WNI yang berada di Afghanistan pada pertengahan tahun 2021. Konflik yang terjadi di Afghanistan ini terjadi akibat Kelompok Taliban yang mengambil alih pemerintahan di Afghanistan dan melakukan sejumlah serangan di wilayah tersebut (Butt, 2023). Kondisi tersebut kemudian membuat pemerintah Indonesia secara tanggap untuk mengevakuasi 26 WNI dan tujuh WNA dari negara tersebut dan turut memindahkan operasional kantor KBRI Kabul ke Islamabad (BBC News Indonesia, 2021). Pada proses evakuasi, warga sipil yang akan

dipulangkan ke Indonesia dijemput menggunakan pesawat TNI Angkatan Udara melalui Bandar Udara Kabul karena bandar udara tersebut hanya dibuka untuk pesawat militer. Pada 21 Agustus 2021, sejumlah WNI dan WNA yang dievakuasi pun tiba di Jakarta (Direktorat Pelindungan WNI Kementerian Luar Negeri RI, 2022).